

## EDITORIAL

Jurnal TINGKAP Volume IX No. 2 bulan Oktober 2013 ini menyajikan 6 artikel, yaitu 2 artikel hasil penelitian, 4 artikel konseptual, dan 1 Resensi buku. Tulisan-tulisan tersebut terangkum dalam satu tema: *Kebijakan, Politik, dan Komunikasi*. dan meliputi berbagai topik, yaitu: *Independensi Harian Umum Singgalang dalam Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat* (Edi Saputra); *Implementasi Good Governance pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat* (Hasbullah Malau); *Profesionalisme Militer di Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat* (Inoki Ulma Tiara); *Pergulatan Antara Ekonomi dan Politik dalam Perspektif Public Choice* (Karjuni Dt. Maani); *The Influence of Candidate Quality and Campaign Issues on Voting Behavior at the Governor Election of West Sumatra Indonesia* (M. Fachri Adnan); dan *Teori dan Model Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Keberkesanan Sistem Pelayanan Publik* (Muhamad Ali bin Embi dan Rita Widyasari). Selain itu Jurnal edisi ini juga dilengkapi dengan sebuah resensi buku *Keraguan dan Kerancuan dalam Gerakan Pribuminasi Ilmu Sosial di Indonesia* (Erianjoni).

Pada tulisan pertama dalam edisi ini **Edi Saputra** menyajikan hasil penelitiannya tentang Independensi Harian Umum Singgalang dalam Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat. Menurut Edi, komunikasi politik merupakan bagian terpenting dan tak dapat dipisahkan dari kegiatan dan proses politik. Keterampilan komunikasi politik juga dapat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagi kesuksesan seorang aktor politik di panggung politik. Dalam komunikasi politik sekelompok orang (partai politik) dengan segala struktur yang tersedia menjalankan fungsi mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Komunikasi politik tersebut dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari sekelompok orang ataupun pemerintah kepada rakyat ataupun sebaliknya. Menurut Edi pula, komunikasi politik adalah komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan-pesan politik terutama pesan-pesan yang dilambangkan dengan menggunakan bahasa dalam arti yang luas. Pesan-pesan yang dimaksud adalah pesan-pesan yang menggunakan elemen bahasa seperti lagu, berita, informasi, pernyataan yang berkaitan dengan sistem nilai kepercayaan dan pendapat serta bisa juga bentuk interpretasi dan kritik. Melalui penelitiannya Edi ingin mengungkapkan bagaimana independensi Harian Umum Singgalang dalam komunikasi politik pada Pilkada di Sumatera Barat, khususnya pada Pilkada Cagub/Cawagub tahun 2005. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut Edi menyimpulkan bahwa Tajuk Rencana Harian Umum Singgalang yang terbit pada masa kampanye Pilkada 2005 di Sumatera Barat dapat dikatakan Harian Umum Singgalang independen sebagai media komunikasi politik. Hal ini bisa di lihat pada penulisan Tajuk Rencana editor yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama cagub/cawagub, tetapi memiliki keleluasaan untuk menyampaikan pandangan, ide, dan pendapatnya terhadap masalah yang diulas. Walaupun dalam penulisannya penulis mendukung pendapat seseorang tetapi hanya bermaksud untuk memperjelas persoalan tidak untuk

mendukung kandidat tertentu dalam kampanye Pilkada sehingga tidak mempengaruhi independensinya. Selain itu, dalam mengulas suatu permasalahan yang timbul saat kampanye, Harian Umum Singgalang bersikap netral dengan memperjelas dan memperluas perspektif masyarakat terhadap persoalan.

Selanjutnya pada tulisan kedua **Hasbullah Malau** menyajikan hasil pemikiran konseptualnya tentang *Implementasi Good Governance pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*. Menurut Hasbullah, salah satu persoalan penting di seluruh dunia kontemporer pada era-post modren adalah tuntutan keterbukaan negara dan kemampuan pemerintah dalam melibatkan masyarakat. Agar negara dan pemerintahan mampu memenuhi tuntutan masyarakatnya tersebut maka negara dan pemerintah harus mereformasi administrasi publiknya menjadi lebih demokratis, efisien, dan menciptakan tatacara (*style*) *good governance* dan *good local governance*. Implementasi *good governance* bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis *local wisdom* sebagai tujuan *governance* akan memberikan warna *the ultimate goal of autonomy* dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Hasbullah pula, menguatnya isu desentralisasi dan demokrasi dalam *local government*, seiring dengan munculnya perspektif baru dalam konteks administrasi publik, terutama *governance*, memberi makna semakin pentingnya memahami administrasi publik (*public administration*) dan tidak hanya terbatas pada praktek lembaga eksekutif. Namun hal ini tidak terlepas dari soal berfungsinya *check and balance* antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, menurut Hasbullah, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur kewenangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2000 dan (Perda) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari serta diikuti oleh Peraturan Daerah (Perda) kabupaten masing-masing memberikan dan membawa harapan baru pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penuh dengan kompatibilitas antar komponen, responsif, responsible, akuntabel, dan transparan terhadap keberadaan, keinginan, tantangan dan tuntutan daerahnya akan memberikan harapan baru bagi para pihak yang kompeten untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Masyarakat, selain sebagai obyek yang diatur dan diperintah juga sebagai pengguna pelayanan serta sebagai subyek atau pelaku penyelenggaraan pemerintahan daerah atas partisipasinya. Oleh karena itu, menurut Hasbullah, konsep *good governance* sebagai tujuan *governance* merupakan interaksi seimbang antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang dapat diwujudkan melalui kerjasama dan koordinasi, mengutamakan dialog, negosiasi menuju musyawarah pada masyarakat Nagari demi tercapainya partisipasi, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, dan akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan nagari. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan daerah berbasis adat bila disinergikan, disandingkan, dan diselaraskan dengan falsafah adat Minangkabau sebagai falsafah dalam Pemerintahan Nagari maka akan terwujud kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan swasta dengan secara selaras dan berpadanan.

Pada tulisan ketiga dalam edisi ini **Inoki Ulma Tiara** menyajikan pula hasil penelitiannya tentang *Profesionalisme Militer di Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat*. Menurut Inoki tujuan menjadikan TNI menjadi militer yang profesional bukanlah disandarkan pada keinginan zaman atau hukuman terhadap kesalahan masa lalu. Ketika profesionalisme militer lahir di dua hal di atas maka profesionalisme militer seperti datang tiba-tiba. Tetapi profesionalisme militer harus didasarkan pada konsep dan tahapan yang jelas. Secara historis ada tiga peristiwa penting yang menjadikan TNI merasa lebih berjasa dan tidak berada di bawah otoritas sipil. *Pertama* adalah revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949. *Kedua* adalah saat pemberontakan muncul di berbagai daerah pada dekade 50-an. *Ketiga*, keberhasilan TNI menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G 30 S/PKI semakin memperbesar saham TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dari ketiga peristiwa penting tersebut, menurut Inoki, keberadaan TNI berada di garis depan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan mendapatkan legitimasi. Berdasarkan hasil penelitiannya, akhirnya Inoki sampai pada kesimpulan bahwa Negara Indonesia adalah sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai subsistem, dan subsistem-subsistem tersebut mengambil peran dan fungsinya masing-masing. Namun di awal Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, subsistem-subsistem tersebut saling tumpang tindih secara peran dan fungsi. Pembenahan sistem bernegara bermuara pada tidak tumpang tindihnya subsistem-subsistem tersebut. Subsistem yang dahulunya memainkan banyak peran dan fungsi adalah tentara mulai dari fungsi pertahanan, keamanan, sosial, politik, dan ekonomi. Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada akhirnya menjadikan tentara sebagai subsistem pertahanan. Ketika tentara hanya berperan di bidang pertahanan harus dilihat sebagai spesialisasi, efisiensi dan efektifitas bernegara bukan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu tentara.

Pada bagian keempat edisi ini **Karjuni Dt. Maani** mencoba pula menguraikan beberapa hal berkenaan dengan *Pergulatan Antara Ekonomi dan Politik dalam Perspektif Public Choice*. Menurut Karjuni, secara sistematis ilmu ekonomi dan ilmu politik di dalam sejarah perjalanannya semakin terpisah dan menjauh satu sama lain. Masing-masing pihak yang diwakili ahli ilmu ekonomi dan ahli ilmu politik, melakukan penalaran dan pencarian teori dengan pendekatan yang berbeda, sehingga bermuara pada bentuk paradigma ilmu dan keluaran yang berlainan. Satu sama lain saling tidak bertemu sehingga kedua kelompok ilmuwan tersebut membahas masalah yang sama sekalipun, hasilnya jauh berbeda dan sulit diperbandingkan. Fakta dan perkembangan ini, menurut Karjuni, menunjukkan bahwa bagian-bagian ilmu sosial saling menjauh satu sama lain karena fokus perhatian dan kerangka analisis yang makin spesifik. Ilmu-ilmu sosial dengan berbagai cabangnya, termasuk ilmu ekonomi, berbeda secara terkotak-kotak sehingga sulit mencapai titik temu, meskipun ada kesamaan objek dan subjek

yang ditelaah. Ilmu ekonomi misalnya hanya menelaah aspek kelembagaan pasar dari berbagai fenomena sehingga tidak bisa menyentuh kelembagaan sosial yang bukan pasar. Sebaliknya, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya sangat miskin kerangka analisis untuk melihat ekonomi, yang didasarkan pada institusi pasar. Menurut Karjuni pula, keterpisahan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik telah berlangsung lama sehingga keduanya tidak mampu memberikan kesimpulan yang sama tentang objek yang ditelaah. Perspektif *public choice* menjembatani antara ekonomi dan politik yang bisa menganalisis masalah di luar kerangka analisis yang bertumpu pada fenomena pasar. Inilah yang memungkinkan pertemuan kembali bidang ekonomi dan politik dalam suatu wilayah analisis sehingga perkembangan ilmu-ilmu sosial di masa mendatang tidak lagi tersekat dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ketat, saling menafikan dan tidak saling menguatkan satu sama lain. Namun walau bagaimana pun, menurut Karjuni, *public choice* (PC) atau *rational choice* (RC) juga mendapat kritik dan dinilai sebagai pendekatan yang naif karena terlalu mempertimbangkan bahwa tindakan individu hanya bertumpu pada sisi rasionalitas individu saja sehingga mengesampingkan kekayaan lembaga, budaya dan politik masyarakat. Karena pendekatan PC mengabstraksikan pengambilan keputusan individu dari pengaruh sosial yang irrasional yang menganggap masyarakat dan budaya adalah *given*, maka pendekatan ini tidak bisa melihat kreasi secara, perubahan preferensi, dan proses pengambilan keputusan individu yang sebenarnya bersifat sangat irasional bahkan intuitif.

Pada bagian kelima edisi ini **M. Fachri Adnan** mencoba pula menganalisis beberapa hal berkenaan dengan Pengaruh Kualitas Calon dan Isu-isu Kampanye terhadap Perilaku Memilih pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2005 (*The Influence of Candidate Quality and Campaign Issues on Voting Behavior at the Governor Election of West Sumatra Indonesia*). Menurut Fachri, perubahan penting yang terjadi dalam sistem politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan untuk menentukan sistem pemilihan langsung kepala daerah di pemerintah kabupaten dan kota serta tingkat provinsi. Sistem pemilihan langsung adalah upaya untuk mewujudkan pemilu lokal yang demokratis. Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. UUD 1945 sebenarnya tidak menyatakan bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung, tapi salah satu cara yang demokratis untuk menentukan kepala daerah pemerintahan adalah ketika orang berpartisipasi dalam pemilihan dan menentukan kepala daerah secara bebas. Oleh karena itu, pemilihan langsung kepala daerah dari pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menerapkan demokrasi dalam administrasi pemerintah daerah. Melalui penelitiannya Fachri mempertanyakan mengetahui apakah kualitas calon, isu kampanye, kontak responden ke media massa, dan ikatan kedaerahan mempengaruhi perilaku memilih pada pemilihan gubernur Sumatera Barat pada tahun 2005 di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitiannya Fachri menemukan bahwa kualitas calon dan isu-isu kampanye secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku pemilih pada Gubernur Sumatera Barat pada

pemilu 2005 di Padang. Namun kontak responden dengan media massa, dan ikatan kedaerahan tampaknya tidak mempengaruhi perilaku memilih pada pemilu tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa kualitas calon dan isu-isu kampanye adalah penting untuk memahami perilaku memilih pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat

Akhirnya pada tulisan terakhir (keenam) dalam edisi ini **Muhamad Ali bin Embi** dan **Rita Widyasari** menyajikan hasil pemikiran konseptual mereka tentang *Teori dan Model Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Keberkesanan Sistem Pelayanan Publik*. Menurut mereka, dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan cabaran, sektor publik dituntut untuk dapat memberikan perkhidmatan (pelayanan) yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan pelayanan yang efektif kepada masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Kutai sangat komit untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum secara terus menerus. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang paling kaya dengan sumber alam. Kabupaten ini merupakan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang terbesar dan merupakan daerah percontohan yang pertama di Indonesia. Namun, dari sumber kekayaan alam yang melimpah, masih kelihatan jurang sosial dalam masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh praktik selama ini dimana hampir 70% kekayaan daerah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat. Pada saat kelemahan tersebut disadari, keputusan diambil oleh Presiden BJ Habiebie agar praktik tersebut dikaji ulang. Di sisi lain, menurut Muhamad Ali Embi dan Rita Widyasari, kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, kemampuan aparat, dan sistem pelayanan. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam ikut menentukan tinggi rendahnya dan baik buruknya suatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kualitas pelayanan publik mempunyai indikator ketepatan waktu, kemudahan dalam pengajuan, akurasi perkhidmatan yang bebas dari kesalahan dan biaya pelayanan. Semakin baik faktor struktur organisasi, kemampuan aparat dan sistem perkhidmatan maka kualitas pelayanan publik akan semakin baik pula dan semakin dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna hasil layanan. Selain itu, menurut mereka, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pengguna untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengadung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan atau dipenuhi kebutuhannya.

Tulisan-tulisan yang disajikan dalam edisi Volume IX Nomor 2 Oktober 2013 ini sangat baik dibaca dan dipahami terutama bagi mereka yang ingin mendalami berbagai persoalan yang menyangkut berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan sejarah, politik, dan komunikasi,

sesuai dengan tema edisi ini. Akhirnya redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan selamat menikmati tulisan ini bagi para pembaca semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi para pembaca sekalian.

Selamat membaca...!

**Syamsir**

Ketua Penyunting